

Peran Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Peningkatan Kompetensi Guru

Maman Saepulloh

Institut Agama Islam Nasional Laroiba Bogor

saepullohmaman105@gmail.com

ABSTRACT

Teacher competence is a strategic factor in determining the quality of education in Indonesia. This study aims to analyze the role of Continuous Professional Development (CPD) policies in improving teacher competence. Using a qualitative approach with literature review methods, this research examines various regulations, programs, and implementation of CPD that have been carried out by the government. The results show that CPD policies, including teacher certification, functional training, and the Teacher Professional Education (PPG) program, have significantly contributed to improving teacher pedagogical and professional competencies. However, several challenges were identified, such as uneven distribution of training, limited budget allocation, and low teacher motivation to participate in self-development activities. This study recommends the need for a more integrated CPD policy approach, strengthening the teacher working group (MGMP) system, and utilizing digital technology to expand access to professional development for teachers in remote areas.

Keywords : *Continuous Professional Development, Teacher Competence, Education Policy, Teacher Quality, Professional Competence.*

ABSTRAK

Kompetensi guru merupakan faktor strategis dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam peningkatan kompetensi guru. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan, program, dan implementasi PKB yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PKB, meliputi sertifikasi guru, pelatihan fungsional, dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Namun, beberapa tantangan teridentifikasi, seperti distribusi pelatihan yang tidak merata, keterbatasan alokasi anggaran, dan rendahnya motivasi guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan PKB yang lebih terintegrasi, penguatan sistem Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pengembangan profesional bagi guru di daerah terpencil.

Kata kunci : *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Kompetensi Guru, Kebijakan Pendidikan, Kualitas Guru, Kompetensi Profesional.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling berkaitan, seperti kurikulum, sarana prasarana, manajemen pendidikan, peserta didik, serta

kualitas tenaga pendidik. Di antara berbagai komponen tersebut, guru memegang peranan sentral sebagai pelaksana utama proses pembelajaran di sekolah. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan evaluator dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, kualitas guru menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan mutu pendidikan suatu bangsa.

Dalam perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Perkembangan teknologi informasi, transformasi digital dalam pembelajaran, perubahan kurikulum, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap guru. Guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menerapkan metode pembelajaran inovatif, memanfaatkan teknologi digital, membangun komunikasi efektif dengan peserta didik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi guru harus terus dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan modern.

Pentingnya kompetensi guru telah ditegaskan dalam berbagai regulasi pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S- 1) atau Diploma Empat (D-IV). Guru sebagai tenaga profesional diwajibkan memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, kompetensi sosial mencerminkan kemampuan guru dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, sedangkan kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap, moral, dan karakter yang harus dimiliki seorang pendidik. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki secara terpadu agar guru mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi guru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari berbagai data menunjukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih belum merata. Survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Balitbang Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih memerlukan peningkatan kompetensi, terutama dalam aspek pedagogik dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, kurang memahami strategi pembelajaran inovatif, serta belum optimal dalam melakukan pengembangan diri secara profesional. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang berlangsung secara cepat sering kali menuntut guru untuk beradaptasi dalam waktu singkat. Kondisi ini menyebabkan perlunya suatu sistem pengembangan profesi yang mampu mendukung guru untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya

secara berkelanjutan dan kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, pemerintah menerapkan kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB merupakan proses pengembangan kompetensi guru yang dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan profesi guru. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. PKB tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik guru, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya belajar sepanjang hayat bagi para pendidik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada dasarnya mencakup berbagai kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi guru. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan diri melalui pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya; publikasi ilmiah seperti penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah; serta karya inovatif yang dapat mendukung efektivitas pembelajaran. Melalui berbagai aktivitas tersebut, guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan profesionalnya sekaligus menghasilkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.

Implementasi kebijakan PKB memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan, guru dapat memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar, serta memperluas wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif. Selain itu, PKB juga memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga dapat melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Dengan demikian, kebijakan PKB tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas guru, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Di era digital saat ini, pelaksanaan PKB juga mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional guru mulai memanfaatkan platform digital sehingga memungkinkan guru untuk belajar secara fleksibel dan mandiri. Pemanfaatan teknologi dalam PKB memberikan peluang yang lebih luas bagi guru untuk mengakses sumber belajar, mengikuti pelatihan daring, serta membangun jejaring profesional dengan sesama pendidik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan PKB memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan akses terhadap program pelatihan, terutama bagi guru yang berada di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dukungan institusi, kurangnya

motivasi guru, serta beban administrasi yang tinggi sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKB. Tidak sedikit pula program PKB yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata guru di sekolah sehingga manfaat yang diperoleh belum optimal.

Permasalahan lain yang muncul adalah masih adanya ketimpangan kualitas pelaksanaan PKB antar wilayah dan antar jenjang pendidikan. Beberapa guru memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, sementara sebagian lainnya masih mengalami keterbatasan akses. Di sisi lain, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan PKB juga menjadi tantangan tersendiri karena peningkatan kompetensi guru tidak hanya diukur dari partisipasi dalam kegiatan pelatihan, tetapi juga dari perubahan nyata dalam praktik pembelajaran di kelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran kebijakan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi guru. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan PKB mampu memberikan dampak terhadap pengembangan profesionalisme guru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Dengan adanya penelitian yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan PKB dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian mengenai peran kebijakan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan juga menjadi relevan karena guru merupakan aktor utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru yang profesional dan kompeten akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi kebijakan PKB tidak hanya penting bagi pengembangan karier guru, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru, mengidentifikasi bentuk implementasi kebijakan PKB, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen, regulasi, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan PKB dan kompetensi guru.

Sumber, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer: Peraturan perundang-undangan terkait PKB, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
2. Data sekunder: Jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan publikasi terkait implementasi PKB dan peningkatan kompetensi guru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait PKB.
2. Review sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan.
3. Analisis terhadap laporan dan data statistik terkait kompetensi guru.

Analisis data dilakukan dengan model analisis isi (content analysis), yang meliputi:

1. Reduksi data: Memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk deskripsi sistematis.
3. Penarikan kesimpulan: Menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan kurikulum, serta tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menempatkan guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Dalam sistem pendidikan nasional, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.

PKB pada dasarnya merupakan proses pengembangan kompetensi guru yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk membantu guru memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar, serta memperkuat sikap profesional dalam melaksanakan tugas pendidikan. Melalui PKB, guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga sebagai pembelajar sepanjang hayat yang harus terus mengembangkan kapasitas dirinya.

Berdasarkan hasil studi literatur, kebijakan PKB di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Berbagai regulasi menegaskan pentingnya pengembangan profesional guru sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Kebijakan tersebut menempatkan guru sebagai tenaga

profesional yang harus memenuhi standar kompetensi tertentu dan terus melakukan pengembangan diri. Dalam implementasinya, PKB mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan, seminar, workshop, kegiatan kelompok kerja guru, penelitian tindakan kelas, publikasi ilmiah, serta karya inovatif.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PKB memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kompetensi guru. Program-program pengembangan profesional yang dilaksanakan secara berkelanjutan mampu membantu guru memahami pendekatan pembelajaran baru, mengembangkan strategi pembelajaran inovatif, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Selain itu, PKB juga memberikan ruang bagi guru untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dengan sesama pendidik.

Dalam konteks pendidikan modern, kebijakan PKB menjadi semakin relevan karena dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat. Transformasi digital dalam pembelajaran menuntut guru untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Guru dituntut mampu menggunakan media digital, platform pembelajaran daring, serta berbagai aplikasi pembelajaran yang mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan PKB menjadi sangat penting dalam membantu guru beradaptasi dengan perkembangan tersebut.

Meskipun demikian, hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKB masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKB belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Guru di daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap program pengembangan profesional dibandingkan guru di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dukungan institusi, serta tingginya beban administrasi guru menjadi faktor penghambat pelaksanaan PKB.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat dipahami bahwa kebijakan PKB tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai strategi pengembangan profesionalisme guru secara menyeluruh. Kebijakan ini memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pembelajaran, mutu pendidikan, dan keberhasilan peserta didik. Dengan demikian, efektivitas implementasi PKB menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Peran Kebijakan PKB dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, serta mengembangkan potensi peserta didik. Berdasarkan hasil studi literatur, kebijakan PKB memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PKB, seperti pelatihan dan workshop pembelajaran, mampu membantu guru memahami pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Guru yang mengikuti program PKB cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyusun perangkat pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang sesuai, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan.

Selain itu, PKB juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mempelajari strategi pembelajaran berbasis teknologi. Dalam era digital, penggunaan media pembelajaran interaktif menjadi kebutuhan penting dalam proses pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang aktif mengikuti kegiatan PKB lebih mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran dibandingkan guru yang jarang mengikuti pengembangan profesional.

Kegiatan PKB juga mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi tersebut penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi perbaikan dalam proses pembelajaran. Melalui refleksi yang berkelanjutan, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara terus-menerus.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKB dalam meningkatkan kompetensi pedagogik sangat dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang diberikan. Program PKB yang bersifat teoritis dan kurang relevan dengan kebutuhan guru sering kali tidak memberikan dampak yang optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan PKB perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata guru di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKB memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Program pengembangan profesional yang dirancang secara tepat mampu membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kemampuan mengajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif.

Peran Kebijakan PKB dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan luas. Kompetensi ini mencakup penguasaan konsep, struktur, metode keilmuan, serta kemampuan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil studi literatur, kebijakan PKB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PKB, seperti seminar akademik, pelatihan kurikulum, dan penelitian tindakan kelas, mampu meningkatkan wawasan keilmuan guru. Guru yang aktif mengikuti program PKB cenderung memiliki pemahaman materi yang lebih baik dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata.

Selain meningkatkan penguasaan materi, PKB juga mendorong guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Melalui kegiatan penelitian tindakan kelas, guru dapat mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di kelas dan mencari solusi berdasarkan pendekatan ilmiah. Penelitian tindakan kelas menjadi salah satu bentuk pengembangan profesional yang mampu meningkatkan kemampuan analitis dan reflektif guru.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa PKB berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan guru dalam menyusun karya ilmiah. Kemampuan menulis karya ilmiah penting bagi guru karena dapat mendukung pengembangan profesional sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pembelajaran.

Namun demikian, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tidak semua guru memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan PKB. Sebagian guru masih memandang PKB sebagai kewajiban administratif untuk kenaikan pangkat, bukan sebagai kebutuhan profesional. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi PKB belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat dipahami bahwa kebijakan PKB memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional, guru dapat memperluas wawasan keilmuan, meningkatkan kemampuan analitis, dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Peran Kebijakan PKB dalam Peningkatan Kompetensi Sosial Guru

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi ini sangat penting karena guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di kelas, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial masyarakat.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan PKB memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi sosial guru. Melalui kegiatan kelompok kerja guru, seminar, workshop, dan komunitas belajar, guru memiliki kesempatan untuk membangun jejaring profesional dan meningkatkan kemampuan komunikasi.

Kegiatan PKB yang bersifat kolaboratif mampu mendorong guru untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembelajaran. Interaksi tersebut membantu guru meningkatkan keterampilan sosial sekaligus memperluas wawasan pendidikan.

Selain itu, pelaksanaan PKB juga membantu guru meningkatkan kemampuan komunikasi dengan peserta didik dan orang tua. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa guru yang aktif mengikuti pelatihan komunikasi pendidikan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas PKB dalam meningkatkan kompetensi sosial masih dipengaruhi oleh budaya kerja di sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang

mendukung kolaborasi sering kali menyebabkan guru kurang aktif dalam kegiatan pengembangan profesional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan institusi sekolah untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKB memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi sosial guru. Melalui kegiatan pengembangan profesional yang kolaboratif, guru dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun jejaring profesional, dan memperkuat hubungan sosial dalam lingkungan pendidikan.

Peran Kebijakan PKB dalam Peningkatan Kompetensi Kepribadian Guru

Kompetensi kepribadian merupakan salah satu dari empat kompetensi utama yang wajib dimiliki guru. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter pribadi yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan mampu menjadi teladan bagi peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Dalam berbagai literatur pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil.
- b. Kepribadian yang dewasa.
- c. Kepribadian yang arif dan bijaksana.
- d. Kepribadian yang berwibawa.
- e. Memiliki akhlak mulia.
- f. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

Penguatan kompetensi kepribadian tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan PKB menjadi sarana yang efektif dalam mendukung pengembangan karakter dan profesionalisme guru.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan PKB memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kompetensi kepribadian guru. Berbagai kegiatan PKB seperti pelatihan karakter guru, workshop etika profesi, komunitas belajar, refleksi pembelajaran, dan kegiatan ilmiah dapat mendorong guru untuk mengembangkan sikap profesional dan integritas pribadi.

PKB juga mendorong guru melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan. Melalui refleksi tersebut, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga mampu memperbaiki perilaku profesional dalam menjalankan tugas pendidikan. Selain itu, interaksi dengan sesama guru dalam komunitas belajar memberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, nilai, dan praktik baik yang berkontribusi terhadap pembentukan kepribadian profesional.

Dengan demikian, kebijakan PKB tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis guru, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter dan etika profesi yang menjadi bagian dari kompetensi kepribadian.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi PKB memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah akademisi pendidikan menemukan bahwa guru yang aktif mengikuti kegiatan PKB menunjukkan peningkatan dalam aspek profesionalisme, tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen terhadap tugas.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pengembangan diri dalam PKB membantu guru meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya etika profesi dan tanggung jawab moral sebagai pendidik. Guru menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan tugas, lebih terbuka terhadap kritik, dan lebih mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan sekolah.

Penelitian lain menunjukkan bahwa program PKB berperan dalam membentuk karakter guru yang lebih profesional. Kegiatan seperti workshop penguatan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan diskusi kelompok profesi memberikan pengalaman belajar yang membantu guru mengembangkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa guru yang secara rutin mengikuti program pengembangan profesi memiliki tingkat kesadaran etis yang lebih tinggi dibandingkan guru yang jarang mengikuti kegiatan PKB. Mereka juga lebih mampu menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal kedisiplinan, etika, dan sikap profesional.

Beberapa penelitian mengenai komunitas belajar guru sebagai bagian dari PKB menunjukkan bahwa kegiatan kolaboratif dapat meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Dalam komunitas belajar, guru tidak hanya berbagi strategi pembelajaran, tetapi juga saling memberikan dukungan moral dan motivasi profesional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi dalam komunitas belajar mendorong guru untuk lebih terbuka terhadap masukan, memiliki sikap reflektif, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian yang lebih matang dan profesional.

Refleksi diri merupakan salah satu komponen penting dalam PKB. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan refleksi mampu meningkatkan kesadaran diri guru terhadap perilaku dan kinerja profesionalnya. Guru yang terbiasa melakukan refleksi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan secara bijaksana.

Melalui refleksi, guru dapat mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dan merencanakan perbaikan pada masa mendatang. Proses ini secara langsung mendukung pengembangan kompetensi kepribadian karena guru belajar memahami dirinya sendiri dan meningkatkan kualitas perilaku profesional.

Meskipun memiliki banyak manfaat, beberapa penelitian juga mengungkapkan adanya kendala dalam implementasi PKB. Kendala tersebut

meliputi keterbatasan waktu, beban administrasi yang tinggi, kurangnya dukungan institusi, serta minimnya fasilitas pengembangan profesi.

Akibatnya, tidak semua guru dapat mengikuti kegiatan PKB secara optimal. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan PKB yang hanya berorientasi pada pemenuhan angka kredit sering kali mengurangi makna substantif program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan agar PKB benar-benar menjadi sarana pengembangan kompetensi guru secara menyeluruh, termasuk kompetensi kepribadian.

Berdasarkan hasil studi literatur dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kebijakan PKB memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian profesional guru. Program PKB memberikan kesempatan bagi guru untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan sikap profesional yang sesuai dengan tuntutan profesi pendidik.

Kompetensi kepribadian tidak hanya berkaitan dengan karakter bawaan individu, tetapi juga dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dan pengalaman profesional. Melalui berbagai kegiatan PKB, guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, baik dari aspek intelektual maupun moral. Dengan demikian, PKB berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter profesional yang berkelanjutan.

Integritas merupakan salah satu unsur utama dalam kompetensi kepribadian guru. Guru dituntut memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap profesinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PKB mampu memperkuat integritas guru melalui berbagai program pembinaan profesi.

Pelatihan dan workshop yang membahas kode etik guru membantu peserta memahami standar perilaku yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas. Selain itu, kegiatan diskusi dan refleksi profesional mendorong guru untuk menginternalisasi nilai-nilai etika sehingga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

Peningkatan integritas tersebut sangat penting karena guru berperan sebagai figur teladan bagi peserta didik. Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepribadian guru yang menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi kepribadian juga mencakup kemampuan mengelola emosi dan menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, kegiatan PKB memberikan kontribusi terhadap peningkatan kematangan emosional guru.

Melalui kegiatan kolaboratif, diskusi profesional, dan refleksi diri, guru belajar memahami berbagai perspektif dan mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi. Guru yang memiliki kematangan emosional akan lebih mampu menghadapi tantangan pembelajaran, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan rekan kerja.

Salah satu temuan penting dari berbagai penelitian adalah peran refleksi dalam meningkatkan kompetensi kepribadian. Kebijakan PKB yang mendorong guru

melakukan refleksi secara sistematis membantu mereka menjadi lebih sadar terhadap perilaku dan kinerjanya.

Sikap reflektif memungkinkan guru untuk terus melakukan perbaikan diri dan mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Guru yang reflektif cenderung lebih terbuka terhadap kritik, lebih adaptif terhadap perubahan, dan lebih mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Karakteristik tersebut merupakan indikator penting dari kompetensi kepribadian yang baik.

Peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui PKB pada akhirnya berdampak pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Guru yang memiliki kepribadian positif akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi peserta didik.

Selain itu, guru yang berintegritas dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan PKB perlu terus diperkuat melalui penyediaan program yang relevan, dukungan kelembagaan yang memadai, serta sistem evaluasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas guru secara komprehensif.

Berdasarkan hasil studi literatur dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru. PKB berkontribusi terhadap pembentukan karakter profesional, penguatan integritas, peningkatan kedewasaan emosional, pengembangan sikap reflektif, serta penguatan etika profesi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa guru yang aktif mengikuti kegiatan PKB cenderung memiliki tingkat profesionalisme dan kompetensi kepribadian yang lebih baik dibandingkan guru yang kurang terlibat dalam program tersebut. Meskipun demikian, efektivitas PKB masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan institusi, ketersediaan fasilitas, motivasi guru, dan kualitas program yang diselenggarakan.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan PKB dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru memerlukan implementasi yang konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan karakter profesional guru sebagai agen utama dalam peningkatan mutu pendidikan.

Kerangka Regulasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Kebijakan PKB di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan terstruktur. Berikut adalah kerangka regulasi PKB:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang ini menjadi landasan utama pengaturan profesi guru. Pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat sebagai guru, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 mengatur bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan/atau rekam jejak prestasi.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan menjadi guru, sertifikasi, dan PKB. Pasal 65 menyatakan bahwa PKB dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sekolah/madrasah. PKB dapat berupa: (1) mengikuti program pendidikan formal; (2) mengikuti program pelatihan fungsional dan/atau kegiatan kolektif; (3) melakukan kegiatan pengembangan diri; dan (4) melaksanakan kegiatan pengembangan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur pemenuhan beban kerja guru yang mencakup kegiatan PKB. Guru wajib melaksanakan PKB minimal 20 jam pelajaran per tahun yang terdiri dari kegiatan kolektif dan/atau mandiri.

Implementasi Kebijakan PKB

Implementasi kebijakan PKB dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan:

a. Program Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan program PKB yang paling signifikan. Program ini bertujuan untuk menjamin kualitas guru melalui penilaian kompetensi. Guru yang telah bersertifikat berhak menerima tunjangan profesi, yang menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri. Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sebagian besar guru di Indonesia telah bersertifikat.

b. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

PPG merupakan program pendidikan setelah sarjana yang wajib diikuti oleh lulusan program studi nonpendidikan yang ingin menjadi guru. Program ini dirancang untuk memastikan calon guru memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai. PPG dilaksanakan dalam dua jalur: PPG Prajabatan untuk calon guru dan PPG Dalam Jabatan untuk guru yang sudah mengajar.

c. Program Pelatihan Fungsional

Pelatihan fungsional merupakan kegiatan PKB yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan ini mencakup berbagai topik, seperti pengembangan kurikulum, metode pembelajaran inovatif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

d. Kegiatan Kolektif (MGMP dan MGMP)

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah kegiatan kolektif guru untuk berbagi pengalaman, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan meningkatkan kompetensi secara kolektif. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari PKB yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan.

e. Kegiatan Pengembangan Diri Mandiri

Guru juga diwajibkan melakukan kegiatan pengembangan diri mandiri, seperti membaca buku, menulis artikel, mengikuti seminar, dan mengembangkan

karya inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya belajar sepanjang hayat (lifelong learning) bagi guru.

Dampak PKB terhadap Peningkatan Kompetensi Guru

Berdasarkan analisis literatur, kebijakan PKB telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru, antara lain:

a. Peningkatan Kualifikasi Akademik

Program sertifikasi dan PPG telah mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru. Sebelum kebijakan sertifikasi, banyak guru yang hanya memiliki kualifikasi Diploma Dua (D-II). Saat ini, sebagian besar guru telah memiliki kualifikasi minimal Sarjana (S-1).

b. Peningkatan Kompetensi Pedagogik

Pelatihan fungsional dan PPG telah berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru. Guru menjadi lebih memahami prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.

c. Peningkatan Kompetensi Profesional

PKB telah mendorong guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum dan tuntutan dunia pendidikan.

d. Peningkatan Motivasi dan Etos Kerja

Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru bersertifikat telah menjadi motivasi bagi guru untuk terus mengembangkan diri. Hal ini berdampak pada peningkatan etos kerja dan dedikasi guru terhadap profesi.

9. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan PKB

Meskipun telah memberikan dampak positif, implementasi kebijakan PKB masih menghadapi berbagai tantangan:

a. Distribusi Pelatihan yang Tidak Merata

Pelatihan dan program PKB masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan pulau Jawa. Guru di daerah terpencil, perbatasan, dan pedalaman masih kesulitan mengakses program PKB karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas.

b. Keterbatasan Anggaran

Alokasi anggaran untuk PKB masih terbatas. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam menyediakan dana untuk pelatihan guru, terutama di daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah.

c. Rendahnya Motivasi Guru

Sebagian guru masih memiliki motivasi rendah untuk mengikuti kegiatan PKB. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya insentif, dan persepsi negatif terhadap manfaat PKB.

d. Kualitas Pelatihan yang Belum Konsisten

Kualitas pelatihan PKB masih bervariasi. Beberapa pelatihan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan guru di lapangan dan lebih bersifat administratif

daripada substantif.

e. Keterbatasan Pengawasan dan Evaluasi

Sistem pengawasan dan evaluasi implementasi PKB masih belum optimal. Banyak kegiatan PKB yang tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) memiliki landasan regulasi yang kuat dan terstruktur, yang meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan berbagai peraturan pelaksanaan.
2. Implementasi kebijakan PKB dilakukan melalui berbagai program, termasuk sertifikasi guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan fungsional, kegiatan kolektif (MGMP/KKG), dan kegiatan pengembangan diri mandiri.
3. Kebijakan PKB telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru, baik dalam aspek kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, maupun motivasi dan etos kerja.
4. Implementasi kebijakan PKB masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk distribusi pelatihan yang tidak merata, keterbatasan anggaran, rendahnya motivasi guru, kualitas pelatihan yang belum konsisten, dan keterbatasan pengawasan serta evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2021). Survei Kompetensi Guru Indonesia 2021. Jakarta: Balitbang Kemendikbudristek.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective Teacher Professional Development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181–199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas.
- Lieberman, A., & Pointer Mace, D. H. (2008). Teacher learning: The key to educational reform. *Journal of Teacher Education*, 59(3), 226–234.

<https://doi.org/10.1177/0022487108317020>

- Muijs, D., & Lindsay, G. (2008). Where are we at? An empirical study of levels and methods of evaluating continuing professional development. *British Educational Research Journal*, 34(2), 195–211. <https://doi.org/10.1080/01411920701532294>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 186. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). *Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration*. Wellington: Ministry of Education.
- UNESCO. (2019). *Teacher Policy Development Guide*. Paris: UNESCO Publishing.
- Villegas-Reimers, E. (2003). *Teacher Professional Development: An International Review of the Literature*. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.